

PROSES PERUBAHAN POLITIK DI MYANMAR: MENUJU DEMOKRASI MELALUI PEMILIHAN UMUM

Oleh : Yolanda Utami Nilasari

Abstract: *After being a closed country for many years before, Myanmar is finally become more open to international community. Election as the one of the significant value of democracy is using to indicate that Myanmar started to have democracy in their country. This action has succeeded to change some of international's community opinions and policies concerning this country.*

Keywords: Myanmar, Election, Democracy, International Respons

PENDAHULUAN

Demokrasi secara tak langsung disepakati sebagai sebuah sistem pemerintahan yang paling baik dalam sebuah negara. Sejak perang dingin berakhir, negara-negara dunia semakin banyak menggunakan sistem ini untuk menjalankan pemerintahannya. Namun belum semua negara di dunia ini menggunakan sistem tersebut, salah satunya adalah negara Myanmar. Myanmar atau dahulu dikenal dengan sebutan Burma atau Birma, merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962, menempatkan Myanmar dalam pemerintahan Junta Militer yang sangat otoriter. Myanmar sejak saat itu juga menjadi negara yang sangat tertutup, terutama terhadap pihak asing (Ganesan, 2005: 47). Berbagai macam kerjasama dan perusahaan asing yang berada di Myanmar diminta untuk meninggalkan negara tersebut. Junta militer juga bertindak sangat tegas dan tak segan menggunakan kekerasan terhadap berbagai pihak oposisi yang mengancam pemerintahannya. Meskipun terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Myanmar, tidak banyak perubahan yang terjadi.

Kondisi Myanmar cenderung semakin memburuk, terlihat dengan semakin tingginya angka kemiskinan dan bertambahnya jumlah pengangguran. Gerakan perlawanan terhadap pemerintahan mulai terjadi di negara ini. Pada tanggal 8 Agustus 1988, muncul sebuah demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Gerakan ini dikenal dengan nama "The uprising of 8888" (Asiaweek 1988). Namun gerakan ini dapat dibubarkan oleh Junta Militer. Ribuan orang menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah di negara ini. Diperkirakan sekitar 3000 orang lebih terbunuh pada peristiwa ini.

Kemudian muncul lagi demonstrasi besar-

besaran pada tahun 2007. Gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para Biksu ini, dikenal dengan nama "Saffron Revolution" (FIDH-ITUC 2005:5). Pemerintah kembali menggunakan kekerasan untuk menghentikan aksi ini, korban yang berjatuh memang tidak sebanyak pada tahun 1988, namun peristiwa ini cukup menghebohkan masyarakat internasional. Tindakan kekerasan tidak hanya dialami oleh warga sipil namun juga oleh para pemuka agama Budha, Biksu. Beberapa rekaman peristiwa yang terjadi dalam aksi ini telah menjadi berita utama di beberapa media internasional.

Myanmar tidak lagi dapat menyangkal berbagai macam pelanggaran Hak Azasi Manusia yang telah terjadi. Berbagai sanksi yang diberikan negara barat terhadap negara tersebut semakin diperketat, dan kondisi ini semakin memperburuk kondisi didalam negeri dan juga hubungan Myanmar dengan negara lainnya. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terjadi pada tahun 1990, dua tahun setelah putusya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut (Ganesan 2005 : 33,47). Kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terkait dengan hasil pemilu 1990, juga mendasari dijatuhkannya sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat pada tahun yang sama.

Tulisan ini akan membahas mengenai proses perubahan politik yang terjadi di Myanmar, melalui pemilihan umum yang terjadi di negara tersebut sebagai salah satu indikasi adanya penerapan sistem demokrasi di negara tersebut. Pemilu yang terjadi sejak kudeta pada tahun 1962 serta tanggapan masyarakat internasional terhadap perubahan tersebut.

PEMBAHASAN

Thomas Carothers mendeskripsikan demokrasi sebagai sebuah kebebasan untuk menformulasikan dan memberikan pilihan-pilihan dalam politik dengan adanya kebebasan untuk

*) Dosen Jurusan Ilmu Hub. Internasional Undip Semarang

berekspresi, berbicara dan kebebasan dasar lainnya. (Winarno 2007: 40). Terdapat persaingan bebas tanpa adanya tindakan kekerasan dan secara teratur melakukan validasi terhadap hukum yang berlaku. Jabatan-jabatan politik yang ada juga menjadi pilihan dalam proses terjadinya demokrasi serta terdapat ketentuan terhadap partisipasi politik bagi semua yang terlibat. Dalam pelaksanaannya diartikan adanya kebebasan untuk membentuk partai-partai politik serta melaksanakan pemilu dengan bebas dan jujur tanpa adanya pengecualian bagi pihak-pihak tertentu.

Menurut Robert Dahl terdapat lima hal yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis atau tidak. Kelima hal tersebut adalah adanya partisipasi efektif, persamaan dalam pemberian suara, pemahaman yang jelas dari warga negara atau anggota dari kelompok tertentu, adanya pengawasan dan keterlibatan orang dewasa (Winarno 2007: 39-40)

Dalam pemberian kebebasan terhadap individu, Dahl mempunyai pendapat bahwa demokrasi adalah yang terbaik dalam hal tersebut. Terdapat tiga instrumental demokrasi dalam mewujudkan kebebasan bagi masyarakat. Pertama, melalui pemilu yang bebas dan adil. Kedua, melalui memaksimalkan bagi setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dan yang terakhir mendorong munculnya otonomi moral, kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan berdasarkan norma-norma yang ada dan juga kemampuan untuk memerintah sendiri (*self-governing*).

Lebih lanjut Dahl menjelaskan mengenai beberapa keunggulan dari pelaksanaan demokrasi. Pertama, demokrasi membantu dalam mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otoriter yang kejam. Kedua, demokrasi menjamin bagi warga negaranya untuk mendapatkan hak asasi yang tidak mampu diberikan oleh sistem yang tidak demokratis. Ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya. Keempat, demokrasi dianggap mampu untuk melindungi kepentingan pokok setiap orang. Kelima, hanya demokrasi yang memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan menentukan nasibnya sendiri dan mengikuti hukum yang mereka pilih sebelumnya. Keenam, hanya pemerintahan yang demokratis yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. Ketujuh, demokrasi memberikan kemungkinan manusia untuk berkembang dengan alternatif lainnya. Kedelapan, hanya pemerintah yang demokratis yang mampu membantu

perkembangan kadar persamaan politik yang cukup tinggi. Kesembilan, adanya kecenderungan untuk perdamaian, karena negara-negara demokrasi modern tidak berperang dengan sesama mereka. Dan yang terakhir adanya kecendrungan bahwa negara-negara yang demokratis lebih makmur dibanding yang tidak. (Winarno 2007: 41-42).

Dalam bukunya *Globalisasi dan krisis demokrasi*, Budi Winarno (2007:42-43) menjelaskan lebih lanjut mengenai tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di dalam kehidupan bernegara sekarang ini. Pertama, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemilu. Kedua, kegagalan demokrasi representatif. Adanya kecendrungan para wakil yang terpilih, tidak membuat kebijakan sesuai dengan keinginan mayoritas yang memilihnya. Ketiga, mudurnya daya tarik demokrasi di dalam masyarakat. Adanya kecendrungan wakil-wakil yang dipilih untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri atau kelompoknya daripada kepentingan orang banyak. Keempat, ketimpangan ekonomi yang terjadi didalam masyarakat telah membatasi kemampuan mereka untuk mempengaruhi terbentuknya kebijakan publik. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dua tahun setelah terjadinya demonstrasi 88, tepatnya pada tahun 1990, pemerintah Myanmar mengadakan pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih anggota parlemen. Sebanyak 93 partai politik termasuk *National League for Democracy* (NLD) yang merupakan pihak oposisi terbesar dan *National Union Party*, sebagai pihak pro-pemerintah (AIPMC: hal. 4). Kemenangan secara mutlak didapatkan oleh NLD, dengan Aung San Suu Kyi sebagai pemimpinnya. Namun hasil dari pemilihan umum tahun ini dibatalkan oleh pemerintah karena diduga banyak melakukan tindak kecurangan.

Kemudian pada tanggal 7 November 2010, Myanmar untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir kembali melaksanakan pemilu untuk memilih anggota parlemen. Pemilu ini diadakan setelah tiga tahun terjadinya *Saffron Revolution*, pemerintah Myanmar mulai melunak terhadap pihak oposisinya. Meskipun pemilu pada tahun ini tidak ditanggapi oleh negara-negara barat dengan positif, namun pemilu pada tahun ini menghasilkan pemerintahan baru yang didominasi oleh sipil dan mulai mengurangi dominasi militer.

Pada pemilu ini masih ada larangan bagi warga yang berstatus atau pernah menjadi tahanan politik untuk mencalonkan diri menjadi kandidat anggota parlemen. Kemudian juga partai-partai

yang memiliki anggota yang pernah menjadi tahanan politik yang juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu. Kemudian juga terdapat ketentuan dalam Undang-undang Pemilu yang disusun agar Aung San Suu Kyi dan partainya tidak dapat ikut berpartisipasi (Deutch Welle, 2011)

Presiden Thein Sein yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya untuk melanjutkan kepemimpinan di negara tersebut mulai melakukan berbagai macam perubahan. Berbagai macam kebijakan untuk mereformasi negara ini mulai diberlakukan terutama di bidang ekonomi dan politik. Antara lain adalah dengan mulai diberikannya kelonggaran kepada pihak media massa, dengan mengurangi sensor terhadap pemberitaan di negara tersebut. Sikap pemerintah Myanmar juga mulai melunak terhadap pihak oposisinya, salah satunya dengan membebaskan para tahanan politiknya (Tribun News, 2013). Sebanyak 300 orang tahanan politik dan mulai dibentuk komisi HAM pada saat tersebut. Selain itu, presiden Thein Sein juga memberikan berbagai kelonggaran terhadap pimpinan dari pihak oposisi. Salah satunya adalah untuk Aung San Suu Kyi, yang diizinkan untuk kembali terlibat dalam kegiatan politik di negara tersebut. Reformasi UU kepartaian dan UU pemilu juga dilakukan, sehingga memungkinkan pihak oposisi terlibat dalam kehidupan bernegara selanjutnya.

Myanmar secara perlahan mulai menjadi negara yang tidak lagi tertutup. Kesempatan bagi pihak asing untuk berkunjung, mengadakan kerjasama bahkan untuk menetap mulai terbuka. Salah satunya peristiwa yang menandai keterbukaan negara ini adalah dengan adanya kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton ke negara tersebut pada tanggal 30 November 2011 (Kompas 2011). Hubungan Myanmar dan Amerika memburuk sejak tahun 1988. Sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap negara ini serta tuduhan terhadap berbagai pelanggaran HAM sempat merenggangkan hubungan dua negara ini untuk waktu beberapa lama (Kompas 2012). Dibidang perekonomian, kerjasama dengan pihak asing mulai banyak dilakukan. Salah satunya dengan Indonesia, kerjasama di bidang manufaktur, pertambangan, tekstil dan perbankan semakin banyak dilakukan.

Pemilihan umum sela selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 1 April 2012. Pemilu ini dilakukan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Parlemen. Kondisi Myanmar pada saat ini sudah banyak berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. NLD bukan lagi satu-satunya partai oposisi yang ada, sebanyak 17 partai oposisi lainnya juga ikut serta dalam Pemilu ini

(Rakyat Merdeka Online 2012). Pemerintah Myanmar juga memperbolehkan adanya pengamat asing yang terlibat dalam Pemilu ini. Mereka mengizinkan sebanyak 100 orang wartawan mancanegara untuk datang dan meliput Pemilu tersebut.

Secara khusus pemerintah Myanmar juga meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mengirimkan perwakilannya sebagai pengamat dalam pemilu tersebut. Selain negara-negara tersebut, Myanmar juga mengundang perwakilan dari ASEAN, China dan Korea Utara untuk bergabung dalam team pengamat internasional (BBC 2013). Bagi masyarakat internasional pengadaan pemilihan umum pada tahun ini sebagai komitmen dari Myanmar untuk melakukan reformasi dan pertimbangan untuk pencabutan sanksi-sanksi sebelumnya.

NLD memenangkan 43 kursi di parlemen, dengan 37 kursi pada majelis rendah, 4 kursi di majelis tinggi dan 2 kursi di majelis daerah (Kompas 2012).

Sebuah langkah awal yang bagus untuk memulai peran pihak oposisi dalam parlemen nasional di negara tersebut. Hal tersebut diharapkan menjadi sebuah perubahan yang besar bagi politik dalam negeri Myanmar. Semakin berkurangnya tekanan yang diberikan militer terhadap sipil dan semakin banyak kebebasan untuk mengkespresikan pendapat dan pilihan, kemungkinan Myanmar menuju kearah demokrasi juga semakin besar.

Masyarakat internasional memberikan respon yang sangat positif mengenai pemilu terakhir ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Ban Ki-moon memberikan pujian terhadap Presiden Thein Sein terhadap keberhasilannya melaksanakan pemilu dan memberikan kesempatan pada pihak oposisi. Suu Kyi diberikan kesempatan untuk menduduki salah satu kursi di parlemen nasional (Kompas 2012). PBB melihat Myanmar mulai menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Meskipun menurut tim pemantau PBB selama pemilu berlangsung masih terdapat banyak keluhan mengenai penyimpangan. Namun bagi para pemegang keputusan politik bahkan pihak oposisi yang mengikuti pemilu ini, tetap menyakini bahwa pemilu sela ini dapat menjadi pendorong terjadinya reformasi. Sebuah reformasi yang ditujukan untuk menjadi sebuah negara yang lebih demokratis.

Indonesia sebagai ketua ASEAN 2012, juga memberikan tanggapan positif mengenai pemilu sela ini. Meskipun tidak semua negara anggota ASEAN pada awalnya menyetujui keanggotaan negara ini, namun Myanmar resmi menjadi

anggota pada tahun 1997. Prinsip *non-interference* yang dianut ASEAN menghalangi negara anggota lainnya untuk memaksa Myanmar menyelesaikan permasalahan domestik. Berbagai macam pembelaan terhadap Myanmar telah banyak dilakukan oleh ASEAN ditingkat internasional. Maka perubahan-perubahan yang mulai terjadi mendapat sambutan yang sangat baik bagi anggota lainnya.

Pemerintah Indonesia dan ASEAN, Myanmar tidak lagi sebagai beban negatif dalam kedudukannya di masyarakat internasional. Penilaian itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa di sela pertemuan KTT ASEAN ke-20 di Kamboja, Selasa 3 April 2012. Menurutnya, Myanmar sekarang berbeda dengan yang dulu (Viva 2012). Myanmar sudah lebih terbuka terhadap pihak asing dan juga semakin lunak terhadap pihak oposisinya.

Negara-negara anggota ASEAN lainnya juga memberikan dukungan kepada Myanmar untuk bisa menjadi ketua ASEAN pada tahun 2014. Keraguan dan kekhawatiran mereka terhadap kepemimpinan Myanmar di ASEAN terkait dengan berbagai macam pelanggaran HAM dan status negatif Myanmar di masyarakat internasional mulai berkurang dengan perubahan yang terjadi di negara tersebut. Demokratisasi yang mulai terjadi di dalam negeri Myanmar juga sesuai dengan salah satu kesepakatan politik untuk menjadi ketua ASEAN berikutnya.

ASEAN juga menyerukan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk pencabutan sanksi yang diberikan kepada negara tersebut. Sejak tahun 1990an, telah banyak sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat terhadap Myanmar. Hal ini terkait dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berbagai macam pelanggaran HAM. Seruan untuk pencabutan sanksi ini diajukan dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN dan Uni Eropa yang diadakan di Brunei Darussalam pada tanggal 26-27 April 2012 (EEAS 2012).

Cina sebagai sekutu terdekat dengan Myanmar, juga memberikan tanggapan yang positif mengenai perkembangan politik di negara ini. Hubungan Cina dan Myanmar terjalin dengan sangat baik, bahkan sejak negara tersebut berada dalam kekuasaan militer dan menjadi negara yang tertutup. Myanmar merupakan salah satu jalur alternatif bagi negara tersebut untuk dapat melakukan hubungan perdagangan internasionalnya. Cina mendukung rezim yang berkuasa di negara tersebut dan melakukan banyak

kerjasama yang berhubungan dengan sumber daya mineral di negara tersebut.

Keterbukaan Myanmar terhadap masyarakat internasional dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara terdekatnya ini. Cina akan mendapatkan banyak pesaing baru dalam hubungan perdagangannya dengan Myanmar, terutama dari negara-negara Barat. Namun hal ini dapat juga dilihat sebagai sebuah kesempatan yang baik, karena apabila kondisi perekonomian di Myanmar semakin membaik, maka Cina juga akan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan hubungan kerjasama di negara ini. Selain itu, kemakmuran nantinya juga akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Myanmar, tidak lagi hanya terbatas kepada kalangan elit dan pemerintah saja (Deutch Welle 2012).

PENUTUP

Meskipun banyak negara-negara dunia yang terlihat lebih makmur ketika menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, pemerintah Myanmar tetap berusaha mempertahankan sistem pemerintahannya yang otoriter dan dikuasai sepenuhnya oleh militer. Pilihan ini menempatkan Myanmar pada posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat internasional. Sanksi ekonomi maupun politik banyak diberikan oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Hal ini terkait dengan berbagai macam pelanggaran HAM, kecurangan dalam pemilu, permasalahan pengungsi dan lainnya.

Setelah sekian lama menjadi negara yang tertutup, Myanmar mulai membuka dirinya terhadap masyarakat internasional. Perubahan nyata juga terjadi didalam negeri, termasuk dengan mulai diberikannya kebebasan untuk berpendapat dan ikut serta dalam politik bagi masyarakat sipil. Pemerintah Myanmar mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menyelenggarakan kehidupan negaranya sendiri. Pemilu yang dilakukan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan bahwa negara tersebut menentukan sendiri waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan perubahan. Berbagai macam keunggulan dan tantangan dari penerapan sistem demokrasi masih menjadi pertimbangan bagi pemerintah Myanmar untuk berubah menjadi negara yang lebih demokratis secara keseluruhan. Dukungan maupun kritikan dari masyarakat internasional juga mempunyai peranan penting dalam proses perubahan politik di negara ini.

Daftar Pustaka

- Hadiwinata, Bob Sugen dan Schuck, Christoph. 2010, *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hlaing, Kway Yin. H, Robet Taylor. Than, Tin Maung Maung. 2005. *Myanmar, Beyond Politics to Societal Imperatives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publication
- Mas'ood, Dr. Mohtar. 2003, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2007, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Pressindo
- Sumber Media Massa:**
- Asiaweek, 1998, "The 8888 people uprising in Burma", 19 Agustus 2013, (<http://www.cncjp.org/files/8888.pdf>)
- AIMPAC, "The 1990 Election in Myanmar, 15 years waiting, Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus", 19 Agustus 2013 (<http://www.aseanmp.org/docs/resources/1990%20Elections.pdf>)
- Burma's "Saffron Revolution" is not over, Time for International Community to act*, Based on a joint Internasional FIDH (Federation Internationale des Ligues des Droits de l'homme) and ITUC (International Trade Union Confederation) mission on Thai-Burma Border, Desember 2007.hal.5, 6 Januari 2012 (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Birmania_FIDH_ITUC_101107.pdf)
- BBC News Asia, "Burma Invites US and EU observers to April Elections", 10 September 2013 (<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17455883>)
- Deutsche Welle, 2013, "Satu Tahun Pasca Pemilu di Myanmar", 15 Agustus 2013 (<http://www.dw.de/satu-tahun-pasca-pemilu-di-myanmar/a-15511480>)
- Deutsche Welle, 2012, "Cina-Myanmar: Berpaling dari Sekutu Lama", 10 September 2013 (<http://www.dw.de/cina-myanmar-berpaling-dari-sekutu-lama/a-15952043>)
- EEAS, 2012, "Pertemuan menteri luar negeri di Brunei Darussalam membuka babak baru hubungan ASEAN dan EU", 19 Agustus 2013 (http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/index_id.htm)
- Hlaing, Kway Yin. H, Robet Taylor. Than, Tin Maung Maung. 2005. *Myanmar, Beyond Politics to Societal Imperatives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publication
- Kompas 2012, "Ban Ki Moon Puji "Keberanian" Presiden Myanmar", 13 Agustus 2013 (<http://internasional.kompas.com/read/2012/04/03/18170943/Ban.Kimoon.Puji.Keberanian.Presiden.Myanmar>)
- Kompas, 2011, "Hillary Clinton Tiba di Myanmar" 15 Agustus 2013, (<http://internasional.kompas.com/read/2011/11/30/23414291/Hillary.Clinton.Tiba.di.Myanmar>)
- Kompas, 2012, "Suu Ki Duduki Kursi Parlemen Myanmar 23 April" 13 Agustus 2013 (<http://internasional.kompas.com/read/2012/04/09/14502043/Suu.Kyi.Duduki.Kursi.Parlemen.Myanmar.23.April>)
- Kompas, April 2012 "Sanksi Myanmar diperingan"
- Radio Merdeka Online, 2012, "Dibawah pengamat asing, Pemilu Myanmar berlangsung hari ini", 15 Agustus 2013 diunduh dari (<http://internasional.rmol.co/read/2012/04/01/59359/Dibawah-Pengamat-Asing.-Pemilu-Myanmar-Berlangsung-Hari-Ini->)
- Tribun News, 2013, "Myanmar memperingati 25 tahun pemberontakan", 15 Agustus 2013, (<http://www.tribunnews.com/internasional/2013/08/08/myanmar-peringati-25-tahun-pemberontakan>)
- Viva News, 2012, "RI: Myanmar bukan lagi beban ASEAN", 13 Agustus 2013 (<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/301416-ri--myanmar-bukan-lagi-beban-bagi-asean>)